

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT  
WANPRESTASI MELALUI *E-COMMERCE* MENURUT UNDANG -  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**Abstrak**

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tiga (3) point, yaitu diantaranya; 1. Bagaimanakah bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dalam pengkajian Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Bagaimanakah peran pemerintah dan perusahaan *e-commerce* dalam implementasi perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, dan 3. Apakah cara penyelesaian masalah yang selama ini dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis *e-commerce* sudah tepat, dalam mencegah *trader* yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau berdasarkan data sekunder, dengan disertai teknik untuk pengambilan data secara *accidental sampling*. Hasil dari penelitian adalah: 1. Sudah, karena pemerintah mengeluarkan dalam bentuk rekomendasi pembentukan perUndang-Undangan SOP untuk perusahaan *e-commerce* contohnya: set-regulasi di setiap perusahaan *e-commerce*. 2. Atas peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi digital melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang SPNBE, dalam hal ini PROLEGNAS dijalankan lima 5 tahun sekali. Adapun para penyelenggara jasa *e-commerce* menawarkan sistem melalui *e-payment*. 3. Pemerintah memberikan cara yang terbaik untuk para pihak yang bersengketa yaitu, melalui jalur litigasi, non-litigasi ataupun dengan cara mediasi/negosiasi. Namun berbeda dengan para penyelenggara mereka melakukan dengan cara *refund*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, *E-Commerce*, Wanprestasi

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS RELATED TO  
WANPRESTATION THROUGH E-COMMERCE ACCORDING TO LAW -  
LAW NUMBER 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION**

***Abstract***

*In this case the writer wants to know three (3) points, which are among them; 1. How is the form of SOP (Standard Operating Procedure) in accordance with the legal basis as in the review of the Trade Law and the Consumer Protection Act. 2. What is the role of the government and e-commerce companies in implementing legal protection for e-commerce consumers with the applicable legal basis in Indonesia, and 3. What are the ways to solve the problems that have been carried out by the government and e-commerce business people in preventing trader who defaults. The research method used is juridical-normative. Data collection is done through library research or based on secondary data, accompanied by techniques for collecting data in an accidental sampling. The results of the study are: 1. Already, because the government issued in the form of recommendations for the establishment of SOP Invitations for e-commerce companies for example: set-regulation in each e-commerce company. 2. For the role of the government in issuing digital economic policies through Presidential Regulation Number 74 of 2017 concerning SPNBE, in this case PROLEGNAS is carried out every five years. The e-commerce service providers offer a system through e-payment. 3. The government provides the best way for the parties to the dispute, namely through litigation, non-litigation or mediation / negotiation. But it is different from the organizers they do by way of refund.*

*Keywords: Legal Protection, Consumer, E-Commerce, Wanprestation*